ABSTRAK

HAMDAYANI, 2017. *Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Ditinjau dari Perspektif Public Choice Theory, dibimbing oleh Abdul Mahsyar dan Abdi.*

Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah berlangsung selama kurang lebih satu dekade, dalam beberapa aspek telah ditunjukkan hasil yang positif, tetapi di sisi lain masih terdapat yang membutuhkan perhatian khusus. Birokrasi pemerintahan daerah yang kurang efektif dan efisien seperti yang terjadi di Kabupaten Takalar, rendahnya profesionalitas birokrasi yang ditandai dengan masih kurangnya pengembangan jaringan dan sistem informasi, kurang optimalnya pengelolaan keuangan daerah, dan kurang optimalnya kinerja pelayanan umum telah menjadi fenomena publik. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplanasi tentang pentingnya reformasi birokrasi pemerintahan daerah di Kabupaten Takalar; untuk melakukan eksplanasi tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan reformasi birokrasi pemerintah daerah di Kabupaten Takalar; dan untuk melakukan eksplanasi tentang model reformasi birokrasi pemerintah daerah di Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif naturalistik-holistik, yakni penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah, data yang dikumpulkan berdasarkan perspektif yang diteliti, desain penelitiannya bersifat fleksibel karena berdasarkan prinsip refleksif dan tidak ada standar, dalam hal ini alat, metode observasi, maupun cara menganalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya reformasi birokrasi pemerintah daerah dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu reformasi birokrasi yang dilakukan karena alasan penguatan *local democracy,* yaitu mendekatkan birokrasi kepada masyarakat yang akan dilayaninya, dan reformasi birokrasi pemerintah daerah karena alasan *economic,* yaitu peningkatan kesejahteraan pegawai dan masyarakat melalui pilihan rasional. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan reformasi birokrasi pemerintah daerah di Kabupaten Takalar agar kinerja birokrasi dapat meningkat adalah: transformasi nilai, penataan organisasi dan tata kerja, pemantapan sistem manajemen dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur. Model reformasi birokrasi pemerintah daerah di Kabupaten Takalar berdasarkan *public choice theory* adalah *rational choice-egaliter dan team work, partisipant-automous*, pemberdayaan masyarakat-demokratisasi profesional dan transparansi anggaran *(public accountability)*-belanja pegawai berdasarkan kinerja, *merit system,* kompetitif, kreatif, dan inovatif dalam memberikan pelayanan, dan depolitisasi birokrasi melalui kontrak kinerja.

Kata kunci: reformasi birokrasi, pemerintah daerah, dan *public choice theory*.

ABSTRACT

HAMDAYANI, 2017. *Local Government Bureaucracy Reform in Public Choice Theory Perspective, Consultant: Abdul Mahsyar and Abdi.*

Bureaucracy reform is one of the reform agenda that has been ongoing for more than one decade in the life of being nation and state, in some aspects has shown positive results, but still require special commission. Local government bureaucracy that is less effective and efficient such as in Takalar Regency, low of bureaucracy professionalism that is characterized by the lack of networks development and information systems, less financial management, and less public service performance has been a public phenomenon. This research aims to explain about the need to reform the local government bureaucracy in Takalar; explain factors for consideration in reforming the local government bureaucracy in Takalar; and to explain about the model of bureaucratic reform of local government in Takalar. This research use the approach and qualitative methods naturalistic-holistic, that research done in a natural condition, the data collected under the perspective of the study, the research design is flexible because it is based on the principle of reflexive and unstandard, in this case the tools, methods of observation, and analysis.

The result shows that the importance to reform the local government bureaucracy viewed from two perspectives, namely bureaucratic reforms undertaken for reason of strengthening local democracy which bring closer the bureaucracy to community it serve and the reform of local government bureaucracy for economic reasons, namely to increase the welfare of employees and public through a rational choice. Factors as consideration to reform the local government bureaucracy in Takalar thus increase are transformation of values, structuring the organization and working procedures, strengthening the management system and improving the competence of personnel resources. Bureaucratic model reform of local government in Takalar by public choice theory is a rational choice-egalitarian and team work, partisipant-automous, empowerment-professional democratization and transparancy of the budget (public accountability)-employees expenditure based on performance, merit system, competitive, creative and innovative in providing services, and the depoliticization of the bureaucracy through a performance contract.

Keywords: bureaucracy reform, local government and public choice theory

